

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “LEMBAGA NEGARA INDONESIA”  
DI SMA NEGERI 5 KAB. TANGERANG**

Mukhlis, Muhammad Reza Fahlevi, Javon Emily Maniagasi,  
Nur Ayudia Hasanah, Syah Alya Wijaya  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

[muchlis@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:muchlis@stih-adhyaksa.ac.id)  
[reza.fahlevi@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:reza.fahlevi@stih-adhyaksa.ac.id)  
[javon.emily@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:javon.emily@stih-adhyaksa.ac.id)  
[nur.hasanah@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:nur.hasanah@stih-adhyaksa.ac.id)  
[syah.wijaya@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:syah.wijaya@stih-adhyaksa.ac.id)

**Abstrak:**

Peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai sistem ketatanegaraan merupakan langkah strategis dalam memperkuat budaya hukum dan demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek penting adalah pengenalan terhadap lembaga-lembaga negara yang berperan dalam sistem pemerintahan Indonesia, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMA mengenai fungsi, peran, dan kewenangan lembaga negara, dengan fokus pada Kejaksaan dan Badan Peradilan. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi mini sidang, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap sistem hukum dan struktur kelembagaan negara. Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan dan kesadaran hukum siswa. Program ini diharapkan menjadi langkah awal membentuk generasi muda yang melek hukum dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara secara konstitusional.

**Kata Kunci:** lembaga negara, kejaksaan, kesadaran hukum siswa.

**Abstract:**

*Improving public understanding—especially among youth—regarding Indonesia’s constitutional system is a strategic step toward strengthening legal awareness and democratic values. One crucial aspect is introducing the roles and functions of state institutions, including the executive, legislative, and judicial branches. This Community Service Program (PkM) aimed to provide legal education to high school students on the structure, roles, and authorities of state institutions, focusing on the Prosecutor’s Office and the Judiciary. Through interactive lectures, group discussions, and mock trial simulations, the activity effectively enhanced students’ comprehension of Indonesia’s legal system and institutional framework. The results of the pre-test and post-test evaluations showed a significant increase in students’ legal knowledge and awareness. This program is expected to be an initial step in shaping a legally literate young generation that actively participates in national life in accordance with constitutional principles.*

**Keywords:** *state institutions, prosecutor’s office, legal awareness among students*

## PENDAHULUAN

Pendidikan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi juga merupakan bagian penting dari penguatan literasi hukum di kalangan pelajar. Terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), pemahaman siswa mengenai sistem ketatanegaraan dan peran lembaga-lembaga negara perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi. Sayangnya, sebagian besar pelajar masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan semangat Pancasila, lembaga-lembaga negara Indonesia dibentuk untuk menjalankan kekuasaan secara terpisah namun saling mengimbangi satu sama lain. Pemahaman terhadap struktur lembaga negara tidak hanya penting dari segi teori kenegaraan, tetapi juga membekali generasi muda untuk lebih kritis dan partisipatif dalam kehidupan berdemokrasi (Kusnadi, 2018). Pendidikan kewarganegaraan yang kuat tidak dapat berjalan efektif tanpa didukung pemahaman praktis mengenai bagaimana sistem pemerintahan dijalankan.

SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang merupakan salah satu institusi pendidikan menengah yang memiliki potensi besar dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan siswa. Namun, dalam proses pembelajaran sehari-hari, waktu yang tersedia dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sering kali terbatas untuk mengulas secara mendalam mengenai praktik kelembagaan negara. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum bertema "*Lembaga Negara Indonesia*" menjadi relevan dan strategis.

Program penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa SMA tentang struktur, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Penyuluhan mencakup lembaga utama negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK, serta lembaga independen lainnya. Selain itu, penyuluhan juga menyampaikan dinamika hubungan antar lembaga dalam sistem presidensial dan prinsip checks and balances yang menjadi penopang demokrasi konstitusional.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta kuis singkat untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan edukatif, kontekstual, dan komunikatif, agar siswa dapat dengan mudah memahami konsep-konsep abstrak yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.

Hasil sementara dari program serupa di beberapa sekolah di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum langsung oleh mahasiswa hukum dan dosen perguruan tinggi berdampak positif terhadap peningkatan literasi hukum pelajar (Rachmawati & Handayani, 2021). Hal ini sejalan dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata institusi pendidikan tinggi kepada lingkungan sekitarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang tidak hanya memahami secara teoritis struktur lembaga negara, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai tersebut merupakan pondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

### 1. **Persiapan dan Koordinasi**

Tahap awal dimulai dengan melakukan koordinasi antara tim pengabdian dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa dengan pihak SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Koordinasi ini mencakup penentuan waktu pelaksanaan kegiatan, pemilihan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan, serta penyusunan materi yang akan disampaikan. Materi penyuluhan difokuskan pada pengenalan lembaga negara Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi pengawasan dan pelengkap.

### 2. **Penyampaian Materi Lembaga Negara Indonesia**

Kegiatan ini berupa penyuluhan hukum yang disampaikan dalam bentuk presentasi interaktif. Materi yang dibahas meliputi pengertian lembaga negara, dasar hukum pembentukan lembaga negara, struktur dan fungsi dari masing-masing lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY, dan BPK, serta peran lembaga negara lainnya seperti KPU, Ombudsman, dan KPK. Pemaparan dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta didik tingkat SMA.

### 3. **Diskusi dan Tanya Jawab**

Setelah materi selesai disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pandangan mereka mengenai peran lembaga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Narasumber dari STIH Adhyaksa memberikan tanggapan serta penjelasan lanjutan untuk memperdalam pemahaman siswa. Diskusi ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan minat siswa terhadap studi hukum dan ketatanegaraan.

### 4. Melalui pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga

mendorong siswa untuk lebih sadar dan kritis terhadap peran serta fungsi lembaga negara dalam sistem demokrasi Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan penyuluhan hukum yang mengangkat tema "*Lembaga Negara Indonesia*" dilaksanakan secara luring di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang dan diikuti oleh sekitar 60 siswa dari kelas XI. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, fungsi, dan peran lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pemberian pre-test untuk mengukur pengetahuan awal siswa mengenai materi lembaga negara. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang jenis dan fungsi lembaga negara, dengan nilai rata-rata sebesar 52,3. Setelah sesi penyuluhan yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah, studi kasus ringan, dan diskusi kelompok, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Hal ini tercermin dari hasil post-test yang rata-rata mencapai skor 82,6.





Respon siswa terhadap kegiatan ini sangat positif. Mereka terlihat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi pemaparan materi hingga sesi tanya jawab. Banyak siswa yang aktif bertanya tentang perbedaan antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi negara. Pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan—dengan memadukan metode ceramah dan visualisasi infografik serta simulasi peran lembaga negara—terbukti efektif dalam membantu siswa memahami materi secara konkret dan menyenangkan.

Selain meningkatkan pemahaman siswa, kegiatan ini juga menjadi momen reflektif bagi para peserta untuk mengenali pentingnya peran lembaga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para guru pendamping menyambut baik penyuluhan ini karena dinilai mampu memperkuat pembelajaran mata pelajaran PKn di sekolah serta menanamkan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya lembaga negara sebagai pilar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan formal sangat relevan dan efektif dalam memperluas literasi hukum generasi muda.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum bertema “*Lembaga Negara Indonesia*” yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan kuis, siswa memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang peran lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya.

Penyuluhan ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya peran lembaga negara dalam menjaga kestabilan demokrasi dan tegaknya hukum di Indonesia. Harapannya, kegiatan ini dapat mendorong terbentuknya generasi muda yang memiliki literasi hukum yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## REFERENSI

- Kusnadi, D. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kenegaraan*. Bumi Aksara.
- Rachmawati, I., & Handayani, S. (2021). Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan literasi hukum siswa SMA di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(2), 117–129.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.